

**BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN IPM DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN: ANALISIS DINAMIS DI JAWA BARAT
MENGUNAKAN MODEL PANEL ARDL**

Zidny Ilman Azmy
Ilmu Ekonomi FEB Universitas Padjadjaran
zidny22001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate the short-term and long-term impacts of social assistance expenditure and the Human Development Index (HDI) on poverty levels in West Java. Utilizing a quantitative approach, the research applies the Panel Autoregressive Distributed Lag (Panel ARDL) model to capture the dynamic interactions among these variables. The analysis is based on panel data from 27 districts and cities in West Java, spanning the period from 2015 to 2024. Poverty rate is used as the dependent variable, while social assistance spending and HDI are treated as independent variables. The findings reveal that HDI significantly and negatively affects poverty levels in both the short and long run. On the other hand, social assistance expenditure does not exhibit a statistically significant influence on poverty within either time frame. Additionally, the presence of a significant and negative Error Correction Term (ECT) coefficient supports the conclusion that the model tends toward long-term equilibrium.

Keywords: Human Development Index, Panel ARDL, Poverty, Social Assistance Spending, West Java

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan pendekatan kuantitatif, studi ini menggunakan metode *Panel Autoregressive Distributed Lag* (Panel ARDL) untuk menangkap dinamika hubungan antar variabel. Data panel yang dianalisis mencakup 27 kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode 2015–2024. Tingkat kemiskinan dijadikan sebagai variabel dependen, sementara belanja bantuan sosial dan IPM merupakan variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek maupun panjang. Sebaliknya, belanja bantuan sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada tingkat kemiskinan dalam kedua periode waktu tersebut. Selain itu, ditemukannya koefisien *Error Correction Term* (ECT) yang negatif dan signifikan memperkuat adanya kecenderungan model menuju keseimbangan jangka panjang.

Kata Kunci: Belanja Bantuan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia, Jawa Barat, Kemiskinan, Panel ARDL

A. Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebuah rencana global yang terdiri dari 17 tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh pada tahun 2030. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan masih merupakan salah satu tantangan paling mendasar. Pada tahun 2024, Bank Dunia dengan standar garis kemiskinan internasional untuk negara berpenghasilan menengah-atas, memperkirakan bahwa sekitar 171,8 juta orang atau 60,3% penduduk Indonesia berada dalam kategori miskin. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan garis kemiskinan nasional mencatat angka kemiskinan hanya sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025b).

Meskipun terdapat perbedaan angka tingkat kemiskinan yang dilaporkan oleh berbagai sumber, kemiskinan di Indonesia tetap menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya. Oleh sebab itu, berbagai upaya pengentasan kemiskinan harus terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat, program sosial yang efektif, serta dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Jawa Barat, Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, telah berupaya keras dalam menangani masalah kemiskinan. Komitmen ini tercermin dalam fakta bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Barat secara konsisten berada di bawah angka nasional (Santoso *et al.*, 2022). Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 Jawa Barat menempati urutan ke-2 sebagai penyumbang kemiskinan terbanyak di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 3,67 juta jiwa. Secara total, persentase kemiskinan Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 7,08% di bawah persentase kemiskinan nasional sebesar 8,57%. Sebagian besar persentase tersebut berasal dari wilayah pedesaan, yang menyumbang 8,85% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2025a).

Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat, pemerintah daerah maupun pusat secara proaktif mengalokasikan anggaran, salah satunya melalui anggaran belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah yang secara spesifik dialokasikan untuk tujuan utama menekan tingkat kemiskinan (Melati *et al.*, 2021). Jenis belanja untuk bantuan sosial mencakup bantuan konsumtif, bantuan produktif, dan bantuan melalui lembaga pendidikan, kesehatan, serta lembaga lainnya (Dharmakarja, 2017). Dengan demikian, belanja bantuan sosial dapat berdampak pada kemiskinan melalui beberapa cara, seperti meningkatkan pendapatan penduduk, meningkatkan peluang kerja dan pengembangan keterampilan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Belanja bantuan sosial telah menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam upaya mengatasi kemiskinan oleh Pemerintah Jawa Barat. Pada tahun 2024, realisasi pengeluaran belanja bantuan sosial Pemerintah Kab/Kota se-Jawa Barat

mencapai 712,90 (milyar rupiah) (Badan Pusat Statistik, 2024a). Belanja bantuan sosial tersebut memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan, tetapi efektivitasnya tergantung pada beberapa faktor. Dengan begitu, pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran agar efektif.

Di sisi lain, pembangunan manusia menjadi faktor jangka panjang yang menentukan kemampuan masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan struktural. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. BPS melaporkan bahwa nilai IPM Jawa Barat tahun 2024 mencapai 74,92. Meskipun demikian, capaian yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ini masih menempatkan Jawa Barat di bawah beberapa provinsi lain di Indonesia. Penelitian empiris menunjukkan bahwa IPM memengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif dan signifikan, seperti yang ditemukan oleh Rahmawati & Sebayang (2023) di tingkat nasional (Rahmawati & Sebayang, 2023).

Namun, efektivitas dari belanja bantuan sosial dan IPM terhadap penurunan kemiskinan bisa berbeda dalam jangka pendek dan panjang. Oleh karena itu, pendekatan ekonometrik seperti *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) Model dalam data panel sangat relevan untuk menganalisis hubungan dinamis tersebut. Model ini memungkinkan untuk menganalisis hubungan kointegrasi antar kabupaten/kota di Jawa Barat, sekaligus mengidentifikasi perbedaan dampak kebijakan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Mengingat tingginya kompleksitas permasalahan kemiskinan yang dipengaruhi oleh beragam faktor ekonomi, sosial, dan struktural, penelitian ini menjadi sangat krusial dalam menyediakan landasan empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan publik. Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini

tidak hanya memberikan landasan yang lebih kokoh untuk formulasi kebijakan, tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata dan adil bagi semua kelompok masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data panel tahunan selama kurun waktu 2015-2024, dengan cakupan wilayah meliputi 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Pemilihan sampel ini didasarkan pada pertimbangan adanya heterogenitas sosial ekonomi dan variasi alokasi belanja sosial antar-wilayah. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi belanja bantuan sosial dan IPM dalam menekan angka kemiskinan, di mana variabel kemiskinan dalam model ini diproksikan oleh jumlah penduduk di bawah standar garis kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik, 2024b).

Tiga variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu belanja bantuan sosial (sas) untuk mengukur intervensi fiskal pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (hdi) untuk merefleksikan capaian pembangunan manusia

(pendidikan, kesehatan, standar hidup), dan tingkat kemiskinan (pov) yang diukur berdasarkan jumlah penduduk miskin dari data resmi BPS. Pemilihan ketiga variabel ini didasarkan pada adaptasi dari berbagai kerangka penelitian yang telah ada sebelumnya.

Data yang dianalisis dalam studi ini bersifat sekunder dan dikumpulkan dari beberapa institusi pemerintah. Untuk variabel kemiskinan dan IPM, data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), sementara data belanja bantuan sosial diperoleh dari laporan APBD kabupaten/kota yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Gabungan dari seluruh data ini menghasilkan total 270 observasi yang kemudian disusun dalam format data panel.

Tabel 1 Operasional Tabel

Variabel	Deskripsi	Satuan	Sumber
pov	Jumlah Penduduk Miskin	(Ribu Jiwa)	Badan Pusat Statistik
sas	Belanja Bantuan Sosial	(Milyar Rupiah)	Kementerian Keuangan
hdi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rasio	Badan Pusat Statistik

Sumber: Diolah Penulis

Panel ARDL-ECM Model

Untuk menganalisis hubungan antar variabel, studi ini menggunakan pendekatan Panel *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Metode ini dipilih karena mampu menangkap

dinamika jangka pendek dan jangka panjang dari hubungan antar variabel, serta dapat mengakomodasi data yang memiliki tingkat integrasi berbeda, yaitu $I(0)$ dan $I(1)$ (Pesaran *et al.*, 1999). Model panel ARDL yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti struktur dasar sebagai berikut:

$$\Delta POV_{it} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta pov_{it-1} + \sum_{i=1}^k \theta_i \Delta sas_{it-1} + \sum_{i=1}^k \gamma_i \Delta hdi_{it-1} + \lambda_1 pov_{it-1} + \lambda_2 sas_{it-1} + \lambda_3 hdi_{it-1} + \mu_{it-1}$$

Di mana α_0 merupakan parameter *drift* yang mencerminkan konstanta dalam model. Dinamika jangka pendek antar model digambarkan oleh bagian dengan simbol penjumlahan ($\sum$), sedangkan hubungan jangka panjang digambarkan dengan bagian persamaan yang melibatkan λ_i . Sementara itu, μ_{it} merupakan *white noise*.

Berikut merupakan bentuk spesifikasi model dalam kerangka *Error Correction Mechanism* (ECM):

$$\Delta POV_{it} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta pov_{it-1} + \sum_{i=1}^k \theta_i \Delta sas_{it-1} + \sum_{i=1}^k \gamma_i \Delta hdi_{it-1} + \eta ECM_{t-1} + \mu_{it-1}$$

Model *Error Correction Mechanism* (ECM) menunjukkan cara bagaimana model menyesuaikan untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang setelah mengalami gangguan dalam jangka pendek. Besarnya kecepatan penyesuaian tersebut ditentukan oleh nilai koefisien ECM yang terdapat dalam model.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Stasioner

Tabel 2 Hasil Uji Stasioner

Variable	Level	First Difference	Order of Integration
pov	-6.4329	-10.5659	I(0)
	(0.0000)	(0.0000)	
sas	-1.0361	-3.3759	I(1)
	(0.1501)	(0.0004)	
hdi	5.7093	-4.6637	I(1)
	(1.0000)	(0.0000)	

Sumber: Data diolah

Uji stasioneritas dilakukan dengan menggunakan metode Pesaran (2007) *unit root* (Pesaran, 2007). Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin (pov) stasioner pada tingkat level, yang berarti terintegrasi pada orde nol (I(0)). Sementara itu, variabel belanja bantuan sosial (sas) dan indeks pembangunan manusia (hdi) menjadi stasioner setelah diferensiasi pertama, sehingga termasuk dalam kategori I(1). Dengan adanya kombinasi tingkat integrasi antara I(0) dan I(1) dalam model, maka pendekatan Panel ARDL dapat digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang antara ketiga variabel tersebut.

Uji Kointegrasi Panel

Setelah melakukan uji akar unit, langkah berikutnya adalah

mengecek apakah variabel-variabel dalam model saling berkointegrasi atau tidak. Dalam penelitian ini, digunakan uji kointegrasi panel dari Pedroni (Pedroni, 1999) karena dianggap efektif untuk melihat hubungan jangka panjang antar variabel dalam data panel. Uji ini berangkat dari hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada kointegrasi antar variabel. Pedroni membagi uji ini ke dalam dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *within-dimension* dan *between-dimension*, yang masing-masing mencakup total tujuh statistik pengujian.

Tabel 3 Hasil Uji Kointegrasi

		<i>With in Dimensions</i>		<i>Between Dimensions</i>	
		Panel	p-value	Group	p-value
V	-	1.392*	0.08196	-	-
Statistic					
p	-	-1.707**	0.0439	0.5427	0.7063
Statistic					
PP	-	-10.81***	0.0000	-13.32***	0.0000
Statistic					
Group	-	-11.19***	0.0000	-15.47***	0.0000
Statistic					

Standard errors in parentheses *** p<0.01, **

p<0.05, * p<0.1

Sumber: Data diolah

Tabel 3 menunjukkan hasil uji kointegrasi panel Pedroni. Berdasarkan pendekatan *within-dimension*, tiga dari empat statistik yaitu p-statistic, PP-statistic, dan Group-statistic berhasil menolak hipotesis nol karena nilai *p-value*-nya

signifikan pada tingkat 1% dan 5%. Sementara itu, dari pendekatan *between-dimension*, dua statistik yaitu PP-statistic dan Group-statistic juga menunjukkan hasil signifikan, yang berarti menolak hipotesis nol. Secara keseluruhan, lima dari tujuh statistik uji mendukung adanya hubungan jangka panjang antar variabel dalam model. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.

Hasil Panel ARDL

Tabel 4 Hasil Regresi Panel ARDL

<i>Long Run Effect</i>				
Variable	Coefficient	Std. Err.	z	P> z
sas	-.0529645	0504307	-1.05	0.294
hdi	-.5404566**	2442716	-2.21	0.027
<i>Short Run Effect</i>				
ECT	-.9594294***	0420513	-22.82	0.000
D.sas	-.1341387	1845902	-0.73	0.467
D.hdi	-8.446722**	3.34975	-2.52	0.012
_cons	188.4228***	23.50321	8.02	0.000

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Data diolah

Hasil estimasi menggunakan pendekatan *Pooled Mean Group* (PMG) dalam model ARDL panel ditunjukkan pada Tabel 4. Berdasarkan estimasi jangka panjang (ECM), variabel IPM (hdi) memiliki koefisien negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan

kualitas pembangunan manusia berkontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. Temuan ini selaras dengan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa IPM secara signifikan menurunkan kemiskinan karena peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan akan mendorong produktivitas dan kesejahteraan (Andykha *et al.*, 2018; Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018)

Sementara itu, variabel belanja bantuan sosial (sas) menunjukkan koefisien negatif namun tidak signifikan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, belanja bantuan sosial belum terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka waktu pengamatan. Hasil ini sejalan dengan temuan (Ayu & Prabowo, 2021; Nabilah & Sugiri, 2022), yang menyatakan bahwa belanja sosial cenderung tidak efektif jika tidak dikelola secara tepat sasaran.

Koefisien *Error Correction Term* (ECT) sebesar -0.9594 dan signifikan pada level 1% menunjukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara variabel dalam model,

dan bahwa setiap penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang akan terkoreksi sebesar 95,9% dalam satu periode. Artinya, model ini memiliki proses konvergensi yang sangat cepat menuju keseimbangan jangka panjang.

Dengan demikian, hasil ini memperkuat pentingnya peningkatan kualitas manusia melalui IPM sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan jangka panjang. Di sisi lain, efektivitas belanja bantuan sosial memerlukan evaluasi lebih lanjut agar dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan dinamis dalam penelitian kemiskinan. Sebagian besar studi sebelumnya menggunakan regresi linier atau OLS yang bersifat statis, sedangkan model ARDL panel memungkinkan pemisahan antara efek jangka pendek dan jangka panjang secara lebih komprehensif.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menggunakan pendekatan Panel ARDL. Hasil

menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, secara langsung meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat miskin, serta menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Sebaliknya, efektivitas belanja bantuan sosial sangat bergantung pada desain program, ketepatan sasaran, dan mekanisme distribusi. Jika tidak dikelola dengan baik, intervensi tersebut justru tidak memberikan dampak berarti.

Oleh karena itu, perlu adanya penataan ulang strategi pengentasan kemiskinan, khususnya dalam penggunaan belanja sosial. Belanja bantuan sosial seharusnya tidak hanya difokuskan pada konsumsi jangka pendek, tetapi diarahkan untuk mendukung peningkatan modal manusia melalui pendidikan, pelatihan

keterampilan, dan akses kesehatan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial bersifat inklusif dan adaptif terhadap karakteristik lokal.

Selain itu, temuan model ARDL menegaskan pentingnya pendekatan dinamis dalam kebijakan kemiskinan. Model ini mampu menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga terbangun dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perbaikan kebijakan sosial membutuhkan waktu dan konsistensi agar hasilnya dapat dirasakan secara menyeluruh.

Ke depan, pemerintah perlu menyusun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang secara terpadu untuk mengentaskan kemiskinan, seperti melalui reformasi institusional, penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan efisiensi program bantuan sosial. Tujuan utamanya harus berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat rentan dan penghapusan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123.
- Ayu, D. P., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan sosial, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 170–185. <https://doi.org/10.26740/independent.v1n1.p170-185>
- Badan Pusat Statistik. (2024a). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2024b). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2025a). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan

- sosial. *E-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)*, 1, 374–389.
- Melati, A. M., Sudrajat, S., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Nabilah, R., & Sugiri, D. (2022). Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan? *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 21(1), 85–98. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v21i1.115>
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(SUPPL), 653–670. <https://doi.org/10.1111/1468-0084.61.s1.14>
- Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312. <https://doi.org/10.1002/jae>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446).
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, 217–240.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(1), 45–53.
- Rahmawati, D., & Sebayang, A. F. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (JRIEB)*, Volume 3, 93–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2871>
- Rarun, C. C. E., Kawung, G. M. V., & Niode, A. O. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 91–102.
- Santoso, K. N., Abiyyi, F., & Marselino, A. R. K. (2022). Analisis Spasial Kemiskinan pada Masa Pemulihan Pandemi Covid-19 di Jawa

Barat Tahun 2021. *Jurnal
Statistika Dan Aplikasinya*,
6(2), 288–299.
<https://doi.org/10.21009/jsa.06>
214